



SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MULTIPARTAI
TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIIL DI INDONESIA**

***JURIDICAL IMPLICATION OF MULTIPARTY SYSTEM
TO PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN
INDONESIA***

**VINA SUSANTI
NIM. 060710101149**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MULTIPARTAI
TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIIL DI INDONESIA**

***JURIDICAL IMPLICATION OF MULTIPARTY SYSTEM
TO PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN
INDONESIA***

**VINA SUSANTI
NIM. 060710101149**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

MOTTO

“Sebaik-baiknya mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas).”



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VINA SUSANTI

NIM : 060710101149

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Agustus 2010

Yang menyatakan,



VINA SUSANTI

NIM. 060710101149

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Drs.H.Sunartono dan Ibunda Hj. Su'aidyah;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan, doa, dan semangat dengan penuh keikhlasan.



**IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MULTIPARTAI
TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

***JURIDICAL IMPLICATION OF MULTIPARTY SYSTEM
TO PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN
INDONESIA***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

VINA SUSANTI
NIM. 0607010101149

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2010**

Oleh:

Pembimbing,

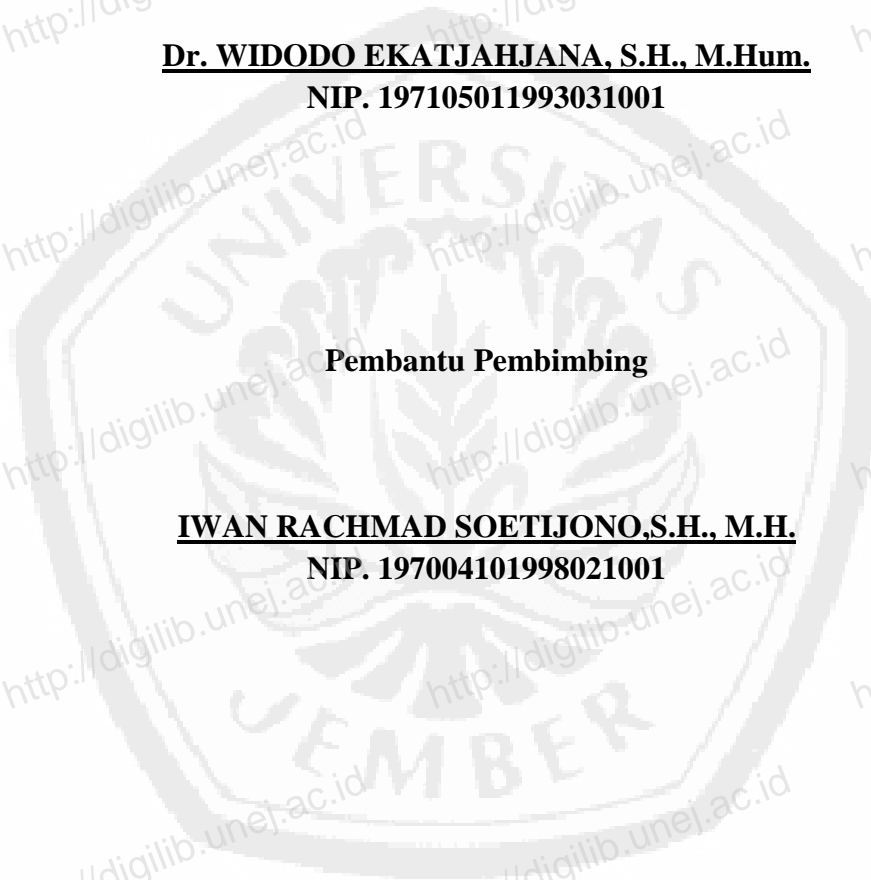
Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

***JURIDICAL IMPLICATION OF MULTIPARTY SYSTEM TO
PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN INDONESIA***

Oleh:

**VINA SUSANTI
NIP. 060710101149**

Pembimbing

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

Pembantu Pembimbing

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02

Bulan : 09

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris,

R. A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 195911151985122001

NIP. 196011221989021002

Anggota Penguji :

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum. :

NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAT SOETIJONO, S.H., M.H. :

NIP. 19700410199802100

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat siselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi;
2. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pembimbing;
3. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Ida Bagus Oka, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
8. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh para pengajar/Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Seluruh civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Ayahanda tercinta Drs. H. Sunartono dan Ibundan tercinta Hj. Su'aidyah;
12. Kakakku tercinta Diah Prawiyanti dan suami Setyo Ima Pamungkas, Gama Harum Pertiwi dan suami Moch. Nanuh Viqrullah;
13. Keponakanku tercinta Mirza Ayyodia Ramadhan, Faunia Attaya Aimadanti, Amirah Zayanaufallah Al Gafi;
14. Richo ilham, yang telah memberikan motivasi, doa, nasehat serta cinta;
15. Martin Pandu, yang telah memberikan banyak bantuan dalam pembuatan skripsi ini, serta kasih dan sayangnya;
16. Sahabat-sahabatku tercinta di Universitas Jember : Dewi Zuhaida, Ayu Mega, Yanuari Risda, Hendra Gani, Firdillah, Qoyyim, insyirah, Bahaudin, Niky, Rio Prihatnolo, Arditya, Eti, Kadek, Fudoko, Anang Prayogi, Dyah, Iin, Yoga, Mifta, Mas Ibnu, Destian Tri, Villa, Maya, Hidayah, Anwar Anang, Bahaudin, Villa Satya, Afri, Setyo Utomo, Rindu Ria, Desy Adventa, Galih, Mihwar Ansyori Yaqob, Alief, Eby, Jefry, Gedhe, Meita, Citra, Indah, Kukuh Fadli, Zaki, Arman, Mas Joic, Mas Fery Kucing, Mas Fery Kancil, Mas Haris, Mas Rahman;
17. Teman-teman kostku di Jawa IV No. 27 Jember : Kulil, Wiba's, Gysem, Tita, Deesy, Firdha, Mb. Ratih, Fury, Figa, Dechy, Neny;
18. Amore Corporation, yang setia membantu saya dalam proses pembuatan skripsi ini;
19. Serta semua pihak yang telah banyak membantu saya dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 03 Agustus 2010

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perubahan sistem yang dijalankan di Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensiil dengan menggabungkannya dengan sistem multipartai yang banyak kita ketahui bahwa sistem presidensiil kurang cocok di terapkan dengan menggunakan sistem multipartai. Salah satu kesepakatan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 terkait Perubahan UUD 1945 adalah “sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil”. Penyempurnaan dilakukan dengan perubahan-perubahan ketentuan UUD 1945 terkait sistem kelembagaan. Perubahan mendasar pertama adalah perubahan kedudukan MPR yang mengakibatkan kedudukan MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Perubahan selanjutnya untuk menyempurnakan sistem presidensiil adalah menyeimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hal ini terutama antara DPR dan Presiden. Hal ini dilakukan dengan pengaturan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 6A, 7, 7A dan 8 UUD 1945. Oleh karena itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka memiliki legitimasi kuat dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan kecuali karena melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia menuju ke arah yang semakin unik. Praktek di lembaga kepresidenan bertahan dengan sistem presidensiil tetapi semangat yang berkembang di legislatif dan pemerintahan menuju ke arah sistem parlementer. Perubahan sistem pemilihan Presiden secara langsung adalah konsekuensi sistem presidensiil sedangkan sistem pembentukan kabinet, pengawasan dan pertanggungjawaban kebijakan politik cenderung ke sistem parlementer. Kecenderungan kearah sistem parlementer dapat pula dilihat dari acara pembentukan kabinet yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji sekian permasalahan mengenai sistem presidensiil yang dijalankan di

Indonesia dengan multipartai saat ini, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA”**.

Permasalahan dari skripsi ini adalah, bagaimanakah implikasi yuridis sistem multipartai terhadap sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia, dan bagaimanakah implikasi multipartai terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta implikasi terhadap tugas dan wewenang Presiden di Indonesia.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut : bila Indonesia menggunakan sistem Presidensiil, maka bukan sistem Multipartai yang diterapkan, melainkan sistem dwi partai atau penyederhanaan partai, karna dalam hal ini menimbulkan banyak ketidakharmonisan didalam sistem pemerintahan. Dengan demikian sistem perwakilan multipartai membawa implikasi ketatanegaraan dalam hal: (a) proses pembentukan kabinet; (b) proses pembentukan Presiden oleh MPR atas permintaan DPR; (c) pemberhentian Presiden oleh MPR atas permintaan DPR. Sistem pertanggungjawaban berdasarkan UUD 1945 sebenarnya menganut sistem parlementer, Presiden “dengan caranya sendiri” tidak akan mengabaikan suara DPR.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xii |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 8 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian | 9 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 9 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah | 10 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum | 10 |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum | 11 |

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1 Demokrasi | 13 |
| 2.1.1 Konsep Dasar Demokrasi | 13 |
| 2.2 Partai Politik dan Pemilihan Umum | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.1 Pengertian Partai Politik | 19 |
| 2.2.2 Pengertian Pemilihan Umum | 22 |
| 2.3 Sistem Pemerintah Dalam Kehidupan Bernegara | 28 |
| 2.3.1 Pengertian Sistem Pemerintahan | 28 |
| 2.3.2 Jenis dan Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Yang Dianut Negara-Negara ... | 29 |
| 2.4 Implikasi Yuridis Sistem Kepartaian Terhadap Sistem Pemerintahan..... | 31 |
| 2.4.1 Implikasi Multipartai terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden | 32 |
| 2.4.2 Implikasi Multipartai Terhadap Pembentukan Kabinet | 33 |
| 2.4.3 Implikasi Multipartai Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Lembaga Kepresidenan | 34 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | |
| 3.1 Implikasi Yuridis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia..... | 36 |
| 3.2 Pengaruh Multipartai Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pengaruhnya Terhadap Tugas dan Wewenang Presiden | 40 |
| 3.2.1 Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden | 40 |
| 3.2.2 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden | 47 |
| 3.2.3 Pengaruh Multipartai Terhadap Pembentukan Kabinet di Indonesia..... | 54 |
| BAB 4 PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan..... | 57 |
| 4.2 Saran | 58 |
| DAFTAR BACAAN | 60 |